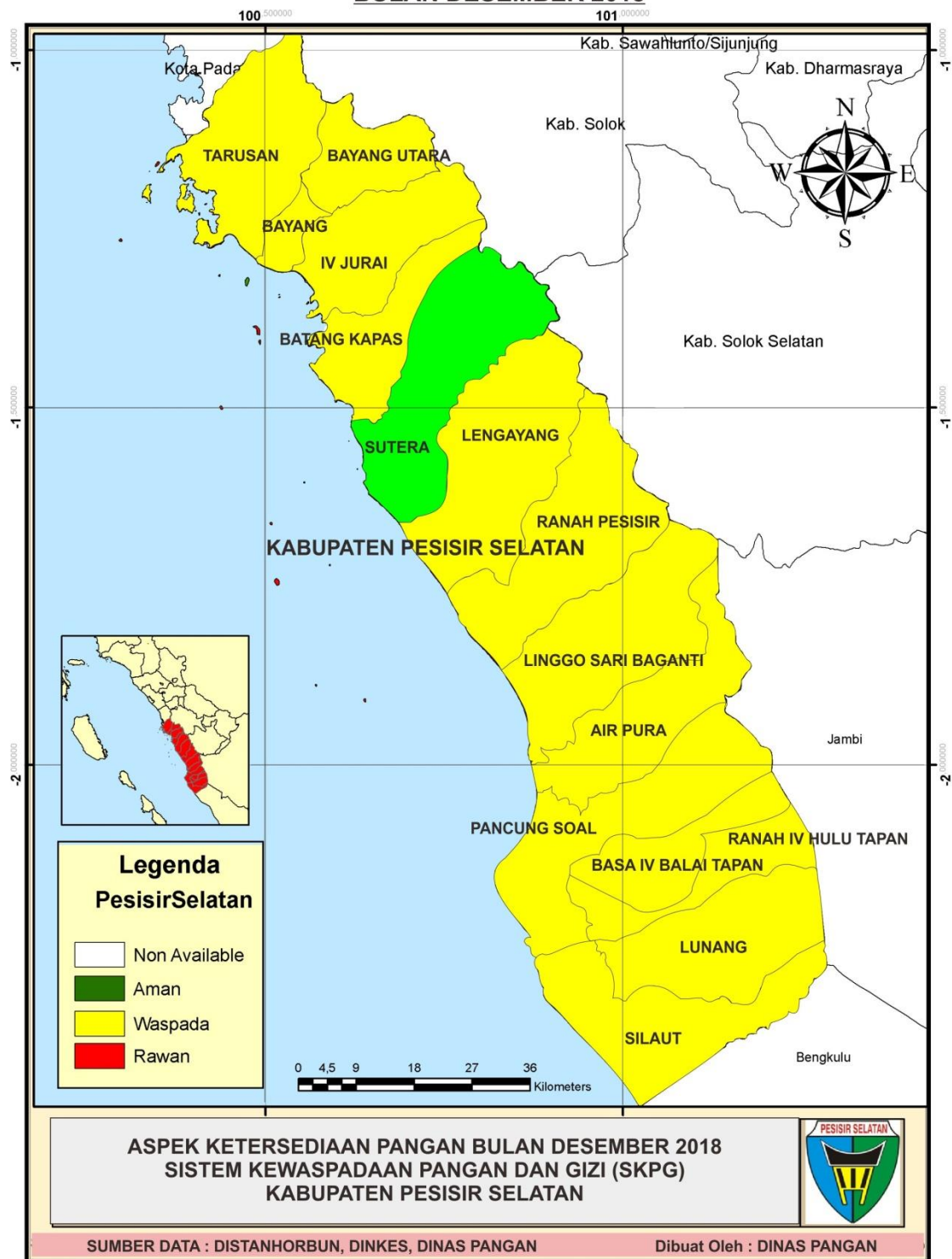


LAPORAN

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

BULAN DESEMBER 2018



DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIUSMAN, S.STPi
NIP : 19700106 199403 1 009
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan/Ketua Tim SKPG
Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa data SKPG Kabupaten Pesisir Selatan bulan Desember 2018 sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Painan, Desember 2018
Mengetahui :
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
BAB II METODE ANALISA SITUASI PANGAN DAN GIZI BULANAN	3
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	3
2.2 Organisasi Pelaksana SKPG	3
2.3 Mekanisme Kerja SKPG	4
BAB III HASIL ANALISA SITUASI PANGAN DAN GIZI BULANAN	9
3.1 Indikator Aspek Ketersediaan Pangan	9
3.2 Indikator Aspek Akses Pangan	10
3.3 Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan	10
3.4 Peta Situasi Pangan dan Gizi	11
BAB IV PENUTUP	14
4.1 Kesimpulan	14
4.2 Saran	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	15

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel	1	Indikator dan Sumber Data SKPG 4
Tabel	2	Analisis Ketersediaan Bulanan 5
Tabel	3	Analisis Akses Pangan Bulanan 6
Tabel	4	Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan 6
Tabel	5	Indikator Komposit Ketersediaan Pangan 7
Tabel	6	Indikator Komposit Akses Pangan 7
Tabel	7	Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan 8

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Bulan Desember 2018	11
Gambar 2 Peta Akses Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Bulan Desember 2018	12
Gambar 3 Peta Pemanfaatan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Bulan Desember 2018	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pangan dan gizi di Indonesia merupakan salah satu masalah pembangunan yang penting dewasa ini dan selalu berkaitan dengan masalah perbaikan mutu kehidupan untuk mampu mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu taraf kehidupan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Masalah pangan dan gizi secara langsung berkaitan dengan pola konsumsi makanan dan pola kesehatan. Oleh karena itu upaya penanganannya merupakan rentetan upaya-upaya peningkatan konsumsi pangan penduduk baik jumlah dan mutunya. Upaya-upaya itu satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling bergantung untuk mencapai tujuan.

Peningkatan situasi pangan dan gizi penduduk merupakan suatu rentetan upaya yang berkaitan yaitu upaya meningkatkan ketahanan pangan yang sangat tergantung pada produksi dan distribusi pangan, upaya meningkatkan daya beli, upaya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya termasuk peningkatan pendidikan. Penanggulangan masalah gizi melalui peningkatan konsumsi pangan penduduk merupakan bagian dari upaya pembangunan pertanian, pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menanggulangi masalah pangan dan gizi adalah SKPG.

Secara umum, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah kegiatan pengamatan terus menerus keadaan pangan dan gizi penduduk, yang bertujuan agar para pengambil keputusan dalam kebijakan dan program perbaikan pangan dan gizi dapat mengambil keputusan dan tindakan secara seksama, tepat waktu dan benar. Informasi dan data akurat yang dikumpulkan secara terus menerus dan teratur harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyusun berbagai kegiatan, seperti peramalan, pemetaan situasi pangan dan gizi, bagi peningkatan ketahanan pangan dan gizi penduduk. Artinya, di dalam SKPG informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan yang diambil sangatlah penting bagi para pengambil keputusan sebagai perencanaan pembangunan pangan dan gizi.

Pelaksanaan SKPG perlu dipahami tidak hanya sebatas pemantauan situasi pangan dan gizi, melainkan sebagai isyarat dini/EWS terhadap perubahan situasi pangan dan gizi. Agar pelaksanaan SKPG tepat metode, tepat sasaran dan tepat waktu, dipandang perlu untuk menyusun panduan penyusunan SKPG yang dapat digunakan bagi para pemangku kepentingan di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya pencegahan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Penerapan SKPG sangat diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat pembagian urusan dalam penanganan kerawanan pangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan SKPG adalah :

- a. Menyediakan informasi secara berkesinambungan tentang situasi pangan dan gizi suatu wilayah.
- b. Menyusun rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi.

BAB II

METODE ANALISA

SITUASI PANGAN DAN GIZI BULANAN

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

a. Pengertian

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan SKPG pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang bersifat simultan yang dilaksanakan dalam suatu kerangka waktu tertentu yang mengedepankan pentingnya menemukan isyarat dini agar dapat mencari alternatif intervensi yang relevan dan dilaksanakan tepat waktu. Tiga kegiatan tersebut meliputi: (1) Pengumpulan data; (2) Pengolahan dan analisis data; dan (3) Penyajian dan desiminasi informasi.

2.2. Organisasi Pelaksana SKPG

a. Tim SKPG

Ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 521/212/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan susunan Tim sebagai berikut :

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretraris
3.	Staf/Pengelola Data Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

4.	Staf/Pengelola Program Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Staf/Petugas Analisis Data SKPG pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

2.3. Mekanisme Kerja SKPG

a. Pengumpulan Data

Data bulanan dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu:

(1) ketersediaan pangan, (2) akses terhadap pangan, (3) pemanfaatan pangan, dan (4) spesifik lokal

Tabel 1. Indikator dan Sumber Data SKPG

Aspek	Indikator	Sumber Data
A. Ketersediaan Pangan	1. Luas tanam komoditas pangan bulan berjalan 2. Luas tanam komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir 3. Luas puso komoditas pangan bulan berjalan 4. Luas puso komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir Catatan: • Untuk seluruh wilayah kab./kota adalah komoditas padi, kecuali untuk wilayah NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua; • Untuk wilayah NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara adalah komoditas padi, jagung, ubi kayu. • Untuk wilayah Papua adalah komoditas padi, ubi jalar, dan ubi kayu	Dinas Pertanian BPS

Aspek	Indikator	Sumber Data
B. Akses Pangan	1. Harga beras untuk seluruh wilayah kab./kota, kecuali untuk wilayah NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. 2. Harga beras, jagung, dan ubi kayu untuk wilayah NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara; 3. Harga beras, ubi jalar, dan ubi kayu untuk wilayah Papua	Disperindag BPS
C. Pemanfaatan Pangan	1. Angka Balita Ditimbang terkoreksi (D') 2. Angka Balita Naik Berat Badan (N) 3. Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) 4. Angka Balita Dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM)	Dinas Kesehatan
D. Indikator Spesifik Lokal sebagai Data Pendukung	1. Data kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dll) 2. Data curah hujan 3. Kasus gizi buruk yang ditemukan 4. Perubahan pola konsumsi pangan, 5. Data sebaran OPT 6. Cadangan pangan	BPBD BMKG Dinkes BPS Dinas Pertanian BKP/Bulog/SKPD terkait

b. Pengolahan dan Analisis Data

Kegiatan analisis SKPG dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota melalui media website SKPG yaitu skpg.bkp.pertanian.go.id. Pada hasil analisis akan diperoleh data analisis dan peta SKPG.

Ketersediaan Pangan

Tabel 2. Analisis Ketersediaan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r \geq 5$	1 = Aman
		$-5 \leq r < 5$	2 = Waspada
		$r < -5$	3 = Rentan
2	Persentase luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r < -5$	1 = Aman
		$5 \leq r < -5$	2 = Waspada
		$r > 5$	3 = Rentan

Keterangan:

- apabila tidak terjadi puso (0), maka masuk kategori aman
- pada wilayah dengan pola konsumsi pangan beragam (NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua) ditambahkan jenis komoditas pangan utama selain padi

Dalam rangka memperkuat analisis ketersediaan bulanan juga dilakukan analisis deskriptif pada data-data pendukung yaitu luas panen dan cadangan pangan yang ada pada bulan bersangkutan.

Akses Pangan

Tabel 3. Analisis Akses Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		$r > 20$	3 = Rentan
2	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas jagung dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rentan
3	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi kayu dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rentan
4	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi jalar dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rentan

Keterangan:

- perubahan harga beras cukup memadai untuk menggambarkan harga pangan secara keseluruhan di seluruh provinsi pada berbagai karakteristik wilayah karena harga beras berkorelasi cukup tinggi dengan harga pangan lain.
- semua wilayah dengan komoditas beras, kecuali untuk wilayah dengan pola konsumsi pangan beragam (NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua) ditambahkan jenis pangan pokok utama selain beras

Aspek Pemanfaatan Pangan

Tabel 4. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase Balita yg naik BB (N) dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang terkoreksi (D')	$r \geq 90$	1 = Aman
		$80 \leq r < 90$	2 = Waspada
		< 80	3 = Rentan
2	Persentase Balita yg BGM dibandingkan Jumlah Balita ditimbang terkoreksi (D')	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 10$	2 = Waspada
		> 10	3 = Rentan
3	Persentase balita yang tidak naik berat	$r < 10$	1 = Aman

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
	badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) dibandingkan Jumlah Balita ditimbang terkoreksi (D')	$10 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		> 20	3 = Rentan

Komposit

Tabel 5. Indikator Komposit Ketersediaan Pangan

	Persentase rata-rata luas tanam komoditas pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam komoditas pangan bulanan 5 tahun			
Persentase rata-rata luas puso komoditas pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso komoditas pangan bulanan 5 tahun	Bobot	1	2	3
	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6

Keterangan:

- skor komposit 2 = warna hijau (aman)
skor komposit 3-4 = warna kuning (waspada)
skor komposit 5-6 = warna merah (rentan)
- untuk daerah yang memilih opsi 1, maka perhitungan skor komposit ketersediaan pangan adalah 100% untuk beras.
- untuk daerah yang memilih opsi 2, maka perhitungan skor komposit ketersediaan pangan adalah 80% untuk beras, 20% komoditas kedua.
- untuk daerah yang memilih opsi 3, maka perhitungan skor komposit ketersediaan pangan adalah 80% untuk beras, 10% komoditas 2 dan 10% komoditas 3.

Tabel 6. Indikator Komposit Akses Pangan

	Bobot	Keterangan
Indikator Tunggal	1	Aman
	2	Waspada
	3	Rentan

Tabel 7. Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan

		Indikator 1 + 2				
Indikator 3	Bobot	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

total bobot 5 – 6 dan tidak ada bobot 3 pada BGM/D' dan 2T/D' = warna kuning (waspada)

total bobot 5 – 9 dan ada bobot 3 pada BGM/D' dan 2T/D' = warna merah (rentan)

Spesifik Lokal

Gejala akan terjadinya rawan pangan dan gizi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Suatu daerah dikatakan aman apabila tidak terjadi perubahan indikator lokal yang berarti jika dibandingkan dengan kondisi normal. Daerah dikatakan waspada apabila terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal. Daerah dapat disebut rawan apabila terjadi perubahan indikator yang sangat ekstrim melebihi kondisi normal.

BAB III

HASIL ANALISA

SITUASI PANGAN DAN GIZI BULANAN

3.1 Indikator Aspek Ketersediaan Pangan

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator Aspek Ketersediaan Pangan, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam kategori Waspada. Kondisi ini disebabkan luas tanam pada bulan ini lebih kecil (53,93%) dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir.

Pada level kecamatan terdapat 1 kecamatan yang berada pada kondisi aman dan 14 kecamatan lainnya berada pada kondisi waspada. Indikasi waspada pada 14 kecamatan disebabkan karena luas tanam pada bulan ini lebih kecil ataupun sedikit lebih besar ($< 5\%$) dibandingkan dengan rata-rata luas tanam 5 tahun terakhir. Berkurangnya luas tanam kemungkinan disebabkan karena dampak dari perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola dan waktu tanam.

Pada indikator luas puso, seluruh kecamatan tidak terjadi puso. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata 5 tahun terakhir pada bulan yang sama. Dengan demikian, kondisi ini akan lebih menjamin luas panen pada bulan-bulan ke depan. Kewaspadaan terhadap terjadinya puso tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, yang dapat mengakibatkan serangan OPT maupun bencana (banjir, kekeringan), terutama menghadapi perkiraan cuaca ekstrem menghadapi musim hujan.

3.2 Indikator Aspek Akses Terhadap Pangan

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator Aspek Akses Terhadap Pangan, dapat dilihat bahwa skor komposit dari indikator-indikator Akses terhadap Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam kategori aman. Harga beras pada bulan ini cenderung sama dibandingkan rata-rata harga 3 bulan terakhir. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 4 kecamatan yang terkategori waspada (Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Airpura, Ranah Pesisir dan Lengayang) dimana terjadi kenaikan harga beras 5-10% dan 11 kecamatan lainnya terkategori aman.

3.3 Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan

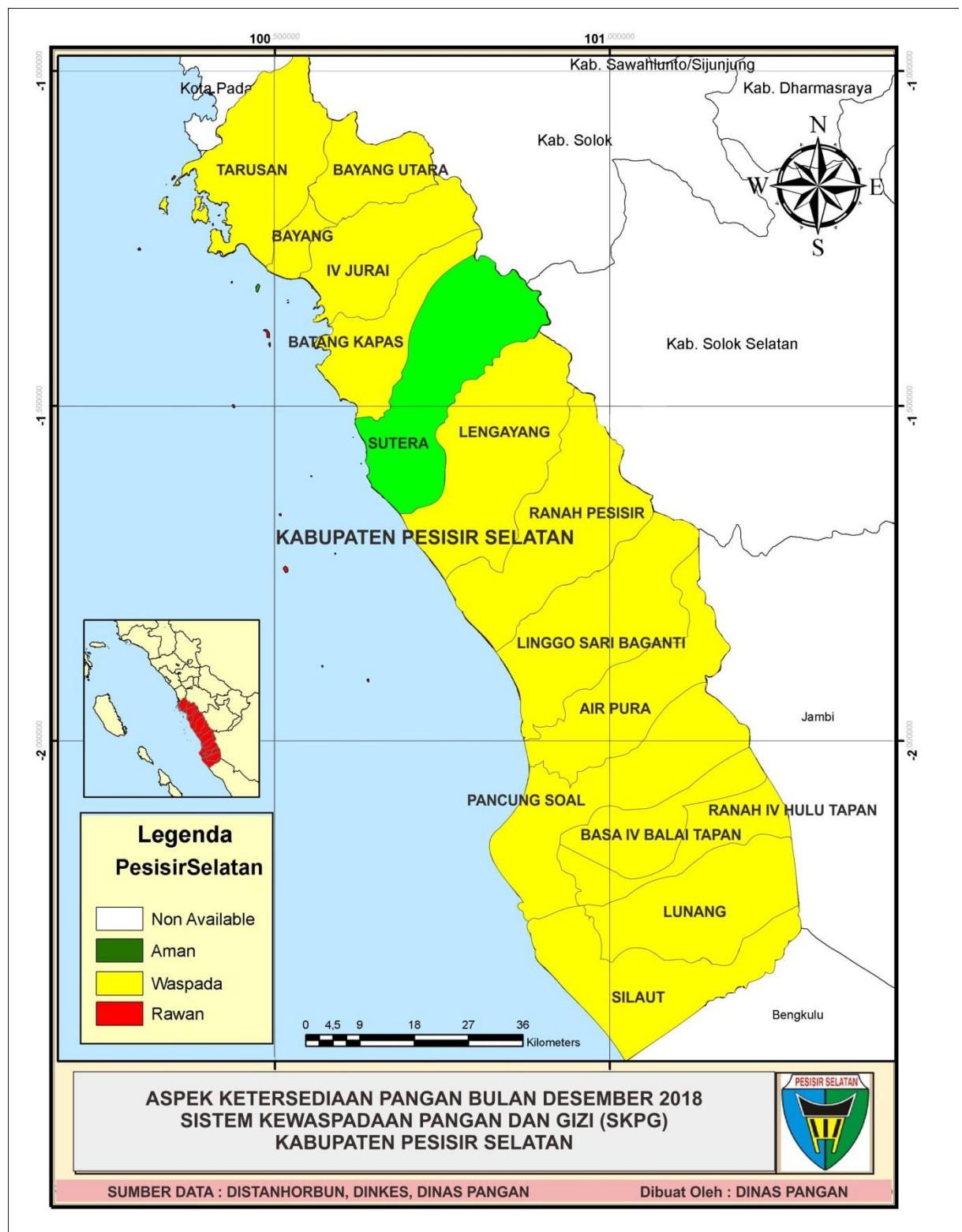
Dari hasil analisa terhadap indikator aspek pemanfaatan pangan, Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam kategori aman. Persentase balita yang naik berat badan (N) dibandingkan dengan jumlah balita ditimbang terkoreksi (D') lebih dari 80 % (aman). Dari 38.380 balita yang ditimbang terkoreksi, sebanyak 33.133 balita yang naik berat badannya atau sekitar 86,32%. Sementara untuk jumlah balita BGM jika dibandingkan dengan jumlah balita yang ditimbang terkoreksi diperoleh persentase sebesar 0,58% yang berarti bahwa untuk indikator ini masuk dalam kategori aman. Jika dilihat dari jumlah balita yang tidak naik berat badan dalam 2 kali penimbangan dibandingkan dengan jumlah balita yang ditimbang terkoreksi diperoleh persentase sebesar 1,1% yang berarti masuk dalam kategori aman.

Pada level Kecamatan terdapat 12 Kecamatan yang terkategori aman dan 3 Kecamatan yang lain terkategori waspada.

3.4 Peta Situasi Pangan dan Gizi

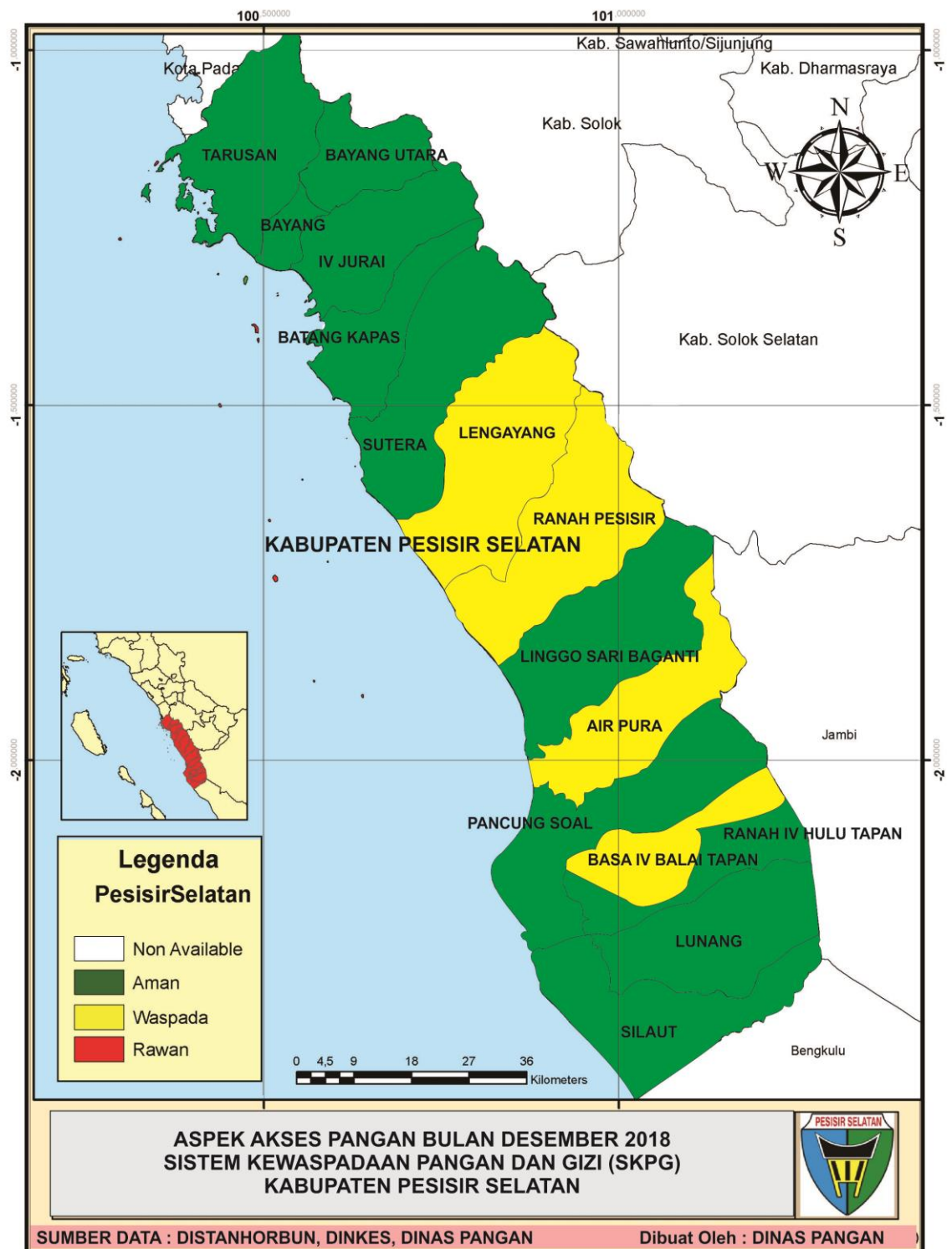
a. Peta Aspek Ketersediaan Pangan

Gambar 1. Peta Aspek Ketersediaan Pangan



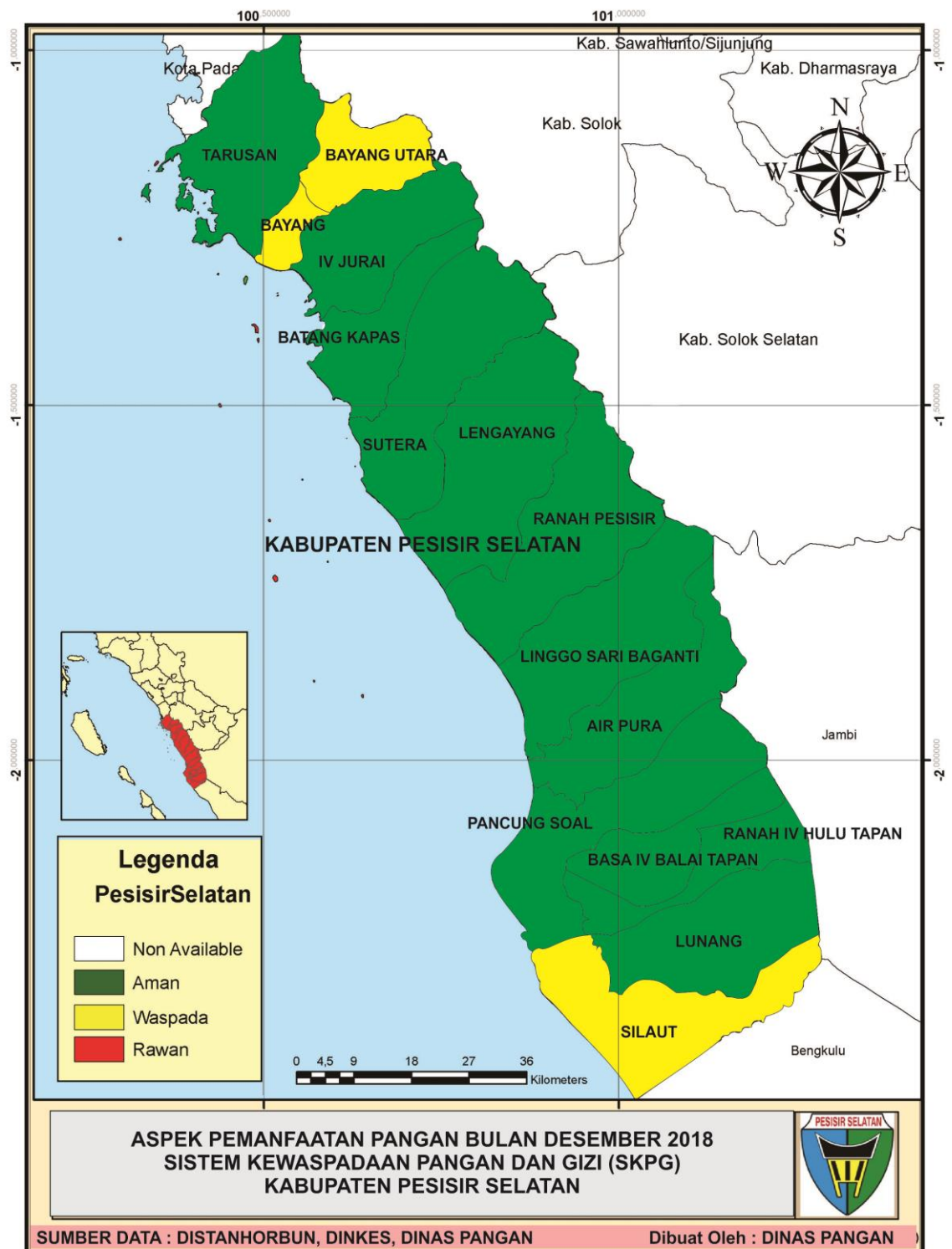
b. Peta Aspek Akses Pangan

Gambar 1. Peta Aspek Akses Pangan



c. Peta Aspek Pemanfaatan Pangan

Gambar 1. Peta Aspek Pemanfaatan Pangan



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan deskriptif terhadap indikator-indikator ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan pada bulan Desember 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Indikator komposit ketersediaan pangan berada dalam kondisi **waspada**.
- b. Indikator komposit akses terhadap pangan berada pada kondisi **aman**.
- c. Indikator komposit pemanfaatan pangan berada pada kondisi **aman**.

4.2. Saran

- a. Perlu diwaspadai kenaikan harga beras pada 3-4 bulan ke depan dengan meningkatkan pemantauan harga beras di kecamatan.
- b. Perlu diwaspadai kemungkinan penurunan N/D' dan peningkatan balita BGM pada kecamatan yang terindikasi rentan dan waspada.
- c. Perlu dilakukan kewaspadaan terhadap status gizi balita dengan mempersiapkan intervensi berupa pemberian PMT.
- d. Perlu penanganan yang komprehensif dalam peningkatan status gizi balita, terutama bagi balita BGM dan yang tidak naik berat badan dalam 2 kali penimbangan (2T) melalui :
 1. Revitalisasi fungsi Posyandu untuk meningkatkan status gizi ibu dan balita;
 2. Peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat
 3. Penambahan Tenaga Kesehatan;
 4. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;
 5. Optimalisasi penanganan kasus gizi buruk dan gizi kurang melalui intervensi kepada penderita dan keluarganya, baik berupa bantuan pangan maupun non pangan;
 6. Perbaikan sanitasi lingkungan tempat tinggal masyarakat.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

